

Gender, Kekuasaan, dan Resistensi: Praktik Perlawanan Perempuan Petani Terhadap Dominasi Ekonomi Ekstraktif di Daerah Pertambangan

Oleh: Syaifudin Suhri Kasim¹, Sarpin¹, Suharty Roslan³, Lutfiana Nur Azizah⁴, Asrani⁵, Dian Puspita Rizki⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze women's resistance practices to extractive economic dominance in mining areas using the perspective of Feminist Political Ecology (FPE) and power theory. Through a qualitative approach that combines in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, this study uncovers the complex dynamics of resistance at the local level. The findings show that women are not only positioned as victims of extractive development that deprives them of access to natural resources, but also appear as agents of social change that build alternative discourses on social, ecological, and gender justice. Forms of women's resistance include open collective action, such as environmental protest and advocacy, as well as subtle everyday practices, such as household resource management and sustainable agriculture that negotiate power in domestic and public spaces. Through community solidarity, social networks, and local wisdom, women are shaping a new environmental politics that challenge patriarchal dominance and exploitative capitalistic logic. This research confirms that women's resistance not only has an impact on changing power relations at the local level, but also contributes to the formation of a more inclusive, equitable, and sustainable governance of natural resources, while enriching the study of feminist political ecology in the global context of the Global South.

Key Word: Gender, Women's Resistance, Extractive Economics, Social Justice, Politics Environment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik resistensi perempuan petani terhadap dominasi ekonomi ekstraktif di wilayah pertambangan dengan menggunakan perspektif Feminist Political Ecology (FPE) dan teori kekuasaan. Melalui pendekatan kualitatif yang memadukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkap dinamika perlawanan yang kompleks di tingkat lokal. Hasil temuan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berposisi sebagai korban dari pembangunan ekstraktif yang menyingkirkan mereka dari akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga tampil sebagai agen perubahan sosial yang membangun wacana alternatif mengenai keadilan sosial, ekologis, dan gender. Bentuk resistensi perempuan mencakup aksi kolektif terbuka, seperti protes dan advokasi lingkungan, serta praktik keseharian yang subtil, seperti pengelolaan sumber daya rumah tangga dan pertanian berkelanjutan yang menegosiasikan kekuasaan dalam ruang domestik dan publik. Melalui solidaritas komunitas, jaringan sosial, dan kearifan lokal, perempuan membentuk politik lingkungan baru yang menantang dominasi patriarki dan logika kapitalistik yang eksploitatif. Penelitian ini menegaskan bahwa resistensi perempuan tidak hanya berdampak pada perubahan relasi kekuasaan di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkaya kajian ekologi politik feminis di konteks global Selatan.

Kata Kunci : Gender, Resistensi Perempuan, Ekonomi Ekstraktif, Keadilan Sosial, Politik Lingkungan

PENDAHULUAN

Pertambangan skala besar dan ekstraksi sumber daya alam telah lama mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan ekologis komunitas lokal. Dampak-dampak tersebut tidak merata: perempuan seringkali menanggung beban yang berbeda dan kadang lebih berat daripada laki-laki, karena posisi gender yang timpang dalam akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan proteksi social (Ayu et al., 2024). Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa kegiatan ekstraktif memperburuk ketidaksetaraan gender melalui kehilangan akses terhadap air dan lahan, penurunan kualitas mata pencaharian berbasis lingkungan, serta meningkatnya kerentanan atas keselamatan dan kesehatan masyarakat (Stringer et al., 2021).

Dalam konteks praktik tahanan dan perlawanan terhadap proyek tambang, perempuan muncul bukan sekadar sebagai korban pasif tetapi sebagai aktor politis yang aktif (*agency*). Literatur terbaru merekam berbagai bentuk tindakan perempuan — dari protes jalanan, gugatan hukum, kampanye advokasi, hingga praktik sehari-hari yang menolak normalisasi proyek ekstraktif, yang memperlihatkan cara-cara kreatif dan strategis untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya hidup dan mempertahankan ruang sosial-kultural komunitas (Grunwald & Saha, 2025). Analisis multi-kasus global memperlihatkan pola di mana perempuan memimpin atau memainkan peran kunci dalam gerakan anti-tambang, sekaligus menghadapi hambatan internal (*patriarki lokal*) dan eksternal (*represi negara atau perusahaan*) (Venes et al., 2019).

Pendekatan teoretis yang paling produktif untuk memahami fenomena ini menggabungkan studi gender, *political ecology feminis* (*Feminist Political Ecology — FPE*), dan teori kekuasaan. FPE menekankan bahwa relasi gender menentukan siapa yang memiliki akses, kontrol, dan pengetahuan mengenai sumber daya alam; relasi ini berinteraksi dengan struktur kekuasaan politik dan ekonomi yang mendorong ekspansi ekstraktif. Dalam perspektif ini, resistensi perempuan tidak hanya berwujud tindakan kolektif melawan proyek, melainkan juga praktik perlawanan kultural yang mempertahankan pengetahuan lokal, ritual, dan praktik reproduksi sosial yang menjadi basis ketahanan komunitas. Teori kekuasaan membantu menjelaskan bagaimana aktor negara, perusahaan, dan elite lokal mereproduksi dominasi ekonomi, serta bagaimana ruang-ruang perlawanan perempuan menegosiasikan kembali aturan tersebut (Vigil, 2024).

Konteks empiris di Indonesia dan kawasan lain juga memperlihatkan variasi bentuk resistensi perempuan. Kasus-kasus lokal seperti gerakan perempuan di desa-desa yang menentang tambang andesit atau tambang nikel menunjukkan bahwa narasi perempuan seringkali dipelintir, misalnya menampilkan perempuan sebagai “korban” atau “ibu pelindung lingkungan”, yang bisa memberi legitimasi tetapi juga memerangkap aktor perempuan dalam peran *essentialist*. Sementara itu, upaya pemberdayaan perempuan di sektor tambang artisanal atau koperasi perempuan di

beberapa wilayah Afrika menunjukkan kemungkinan rekonstruksi peran perempuan; dari ketergantungan pada pelaku ekstraktif menjadi pengelola alternatif ekonomi lokal. Temuan jurnalistik dan penelitian lapangan terbaru mendokumentasikan kedua dinamika ini: perempuan dapat menjadi kekuatan transformatif namun tetap menghadapi hambatan struktural signifikan (Widiastuti et al., 2024).

Meskipun ada peningkatan literatur sejak 2020 tentang perempuan dan konflik ekstraktif, beberapa celah penelitian tetap nyata. Pertama, studi-studi komparatif yang menghubungkan dimensi lokal (praktik budaya, struktur keluarga, peran kerja) dengan politik tingkat nasional (kebijakan pertambangan, regulasi lingkungan) masih terbatas. Kedua, metode yang mampu menangkap praktik perlawanan yang “halus”, resistensi sehari-hari, pemeliharaan pengetahuan lokal, taktik negosiasi di ruang domestic, belum selalu mendapat perhatian yang seimbang dibandingkan aksi protes publik. Ketiga, perlu analisis yang lebih tajam soal bagaimana wacana gender (mis. motherhood, indigenous womanhood) dimobilisasi oleh aktor berbeda untuk memperkuat atau melemahkan gerakan anti-tambang. Kesenjangan-kesenjangan ini menyulitkan perumusan rekomendasi kebijakan yang benar-benar responsif gender (Policies & Plans, 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik resistensi perempuan di daerah pertambangan; (2) menganalisis bagaimana relasi kekuasaan lokal dan nasional mempengaruhi potensi dan batasan resistensi tersebut; dan (3) mengeksplorasi implikasi strategi perempuan terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya dan keadilan lingkungan. Studi ini menggunakan kerangka Feminist Political Ecology yang dipadu metode etnografi partisipatif dan analisis wacana, sehingga dapat menangkap interaksi antara praktik material sehari-hari dan narasi politik yang lebih makro (Lesnikov et al., 2023). Pada kajian ini, penulis memfokuskan pada perempuan petani, karena mereka mengalami dampak ekologis dan sosial yang spesifik, seperti perubahan akses air, pangan, dan ruang domestic yang berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis pada studi gender dan ekstraktivisme, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang memperhatikan keadilan gender dan keberlanjutan komunitas terdampak .

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, yang berupaya memahami makna sosial di balik praktik resistensi perempuan terhadap dominasi ekonomi ekstraktif di wilayah pertambangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri pengalaman hidup, strategi bertahan, dan bentuk perlawanan perempuan secara mendalam dalam konteks sosial, ekonomi, dan ekologis yang spesifik (Creswell & Poth, 2021).

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi interpretasi berlapis terhadap bagaimana relasi kekuasaan, identitas gender, dan dinamika lokal saling memengaruhi dalam praktik resistensi yang muncul di tingkat akar rumput.

Penelitian ini dilaksanakan di Konawe Selatan sebagai satu daerah pertambangan di Sulawesi Tenggara yang mengalami konflik sosial- ekologis akibat aktivitas ekstraktif. Pemilihan lokasi dilakukan secara **purposive**, dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama: (1) adanya aktivitas pertambangan aktif yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat; (2) keberadaan kelompok atau jaringan perempuan yang terlibat dalam aksi penolakan, advokasi, atau bentuk perlawanan lain terhadap pertambangan; serta (3) keterjangkauan wilayah bagi kegiatan pengumpulan data lapangan. Strategi pemilihan ini memungkinkan penelitian memfokuskan diri pada konteks empiris yang kaya akan interaksi antara kekuasaan, gender, dan resistensi (Bryman, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pertama, wawancara mendalam dilakukan terhadap 20 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas perempuan yang aktif dalam gerakan anti-tambang, anggota keluarga mereka, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah lokal dan perusahaan tambang. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar tetap fleksibel mengikuti dinamika narasi informan dan memungkinkan eksplorasi isu-isu sensitif, seperti kekerasan simbolik, tekanan sosial, dan strategi negosiasi gender dalam ruang publik maupun domestik (Rubin & Rubin, 2021).

Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama beberapa bulan untuk memahami praktik resistensi yang berlangsung secara langsung di lapangan. Peneliti terlibat dalam kegiatan komunitas seperti pertemuan warga, ritual adat, dan forum perempuan, guna mengamati bagaimana simbol, bahasa, dan tindakan sehari-hari menjadi medium perlawanan terhadap proyek pertambangan. Pendekatan observasi partisipatif penting karena banyak praktik resistensi perempuan bersifat tersembunyi atau subtil, dan tidak selalu terepresentasi dalam aksi kolektif yang eksplisit (Scott, 2020).

Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap laporan organisasi masyarakat sipil, kebijakan pemerintah daerah, peraturan pertambangan, serta arsip media yang memberitakan konflik pertambangan di wilayah studi. Dokumen ini berfungsi untuk memahami bagaimana wacana kekuasaan dan gender dibentuk serta disebarkan melalui kebijakan dan media. Data sekunder juga meliputi publikasi akademik, laporan lembaga internasional seperti UN Women (2023) dan Oxfam (2022), yang memberikan konteks perbandingan tentang gender dan resistensi di sektor ekstraktif.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2021) untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam narasi informan. Proses analisis melibatkan tiga tahap: (1) transkripsi dan pengodean terbuka untuk mengidentifikasi tema awal seperti *strategi resistensi, negosiasi kekuasaan, representasi gender, dan solidaritas komunitas*; (2) pengodean aksial untuk menghubungkan tema-tema tersebut dengan konteks sosial dan politik; dan (3) pengodean selektif guna membangun model konseptual tentang dinamika resistensi perempuan dalam ruang kekuasaan ekonomi ekstraktif.

Untuk memperkuat validitas, dilakukan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen guna memastikan konsistensi data (Flick, 2022). Selain itu, memberi checking dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk memverifikasi interpretasi peneliti terhadap data mereka, guna menjaga kredibilitas dan etika penelitian.

Etika penelitian dijunjung tinggi sepanjang proses. Setiap informan diberi penjelasan menyeluruh mengenai tujuan penelitian, hak atas kerahasiaan, serta kebebasan untuk menarik diri kapan saja. Identitas informan disamarkan menggunakan pseudonim, dan seluruh data disimpan secara aman sesuai pedoman etika penelitian sosial (British Sociological Association, 2021).

Dari segi kerangka analisis, penelitian ini menggunakan lensa Feminist Political Ecology (FPE) yang menekankan hubungan antara gender, kekuasaan, dan lingkungan. Kerangka ini memandang resistensi perempuan sebagai ekspresi dari upaya mempertahankan ruang hidup dan kontrol atas sumber daya yang terancam oleh sistem ekonomi ekstraktif. Analisis dilengkapi dengan teori kekuasaan Foucault tentang relasi kuasa dan resistensi, serta teori praktik sosial Pierre Bourdieu untuk memahami bagaimana habitus perempuan di daerah tambang membentuk strategi dan taktik perlawanan mereka (Bourdieu, 1990; Nightingale, 2021).

Melalui kombinasi pendekatan kualitatif, etnografi partisipatif, dan analisis feminis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam dinamika resistensi perempuan terhadap dominasi ekonomi ekstraktif, sekaligus mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja — baik melalui struktur formal maupun praktik sosial sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur tentang gender dan ekstraktivisme, tetapi juga memberi masukan empiris bagi

PEMBAHASAN

Konteks Sosial dan Ekologis Resistensi Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah studi telah mengubah struktur sosial dan ekologi lokal secara mendasar. Lahan pertanian dan hutan yang sebelumnya menjadi basis ekonomi dan ruang hidup perempuan kini beralih fungsi menjadi area

eksploitasi mineral berskala besar. Pergeseran fungsi lahan tersebut tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan, tetapi juga menggerus sistem penghidupan tradisional yang selama ini menopang ekonomi rumah tangga perempuan, seperti bertani, mengumpulkan hasil hutan nonkayu, dan memanfaatkan sumber air alami untuk kebutuhan domestik. Ketika tanah, air, dan hutan hilang atau tercemar, perempuan mengalami beban ganda: kehilangan sumber pendapatan sekaligus tanggung jawab sosial untuk memastikan keberlanjutan kehidupan keluarga.

UN Women (2023) mencatat bahwa dampak ekologis dari aktivitas pertambangan sering kali memiliki dimensi gender yang kuat, karena perempuan berada di garis depan dalam urusan reproduksi sosial; penyediaan air bersih, pangan, dan kesehatan keluarga. Dengan berkurangnya akses terhadap sumber daya alam, perempuan dipaksa mencari alternatif baru untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang sering kali memerlukan waktu dan tenaga lebih besar. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis ekologis bukan hanya persoalan lingkungan semata, tetapi juga krisis sosial dan gender yang memengaruhi struktur relasi kekuasaan di tingkat komunitas.

Dalam konteks tersebut, resistensi perempuan muncul dalam beragam bentuk. Sebagian perempuan menolak secara terbuka keberadaan perusahaan tambang melalui aksi demonstrasi, advokasi, dan keterlibatan dalam jaringan masyarakat sipil. Namun, bentuk resistensi yang lebih halus dan sehari-hari juga muncul, seperti menolak menjual lahan, mempertahankan ritual adat, atau mengajarkan nilai-nilai ekologis kepada generasi muda. Praktik resistensi ini bersifat simbolik, tetapi memiliki makna politis yang kuat: menegaskan kembali hak perempuan atas ruang hidup, budaya, dan alam yang telah lama menjadi bagian dari identitas mereka.

Resistensi tersebut tidak semata merupakan reaksi terhadap kehilangan sumber daya alam, tetapi juga terhadap marginalisasi sosial dan politik yang muncul akibat dominasi ekonomi ekstraktif. Ketika proses pengambilan keputusan mengenai pertambangan diabaikan dari partisipasi perempuan, mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya, tetapi juga kehilangan suara dalam menentukan masa depan komunitasnya. Dalam konteks ini, perjuangan perempuan atas lingkungan menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem patriarki dan kapitalisme ekstraktif yang mengesampingkan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial.

Temuan ini memperkuat analisis *Feminist Political Ecology* (Nightingale, 2021) yang menekankan bahwa perjuangan perempuan terhadap degradasi lingkungan bukan hanya tentang mempertahankan sumber ekonomi, melainkan juga mempertahankan otonomi sosial, nilai-nilai kultural, dan eksistensi identitas kolektif. Ekologi politik feminis melihat bahwa hubungan perempuan dengan alam bukanlah relasi instrumental semata, melainkan relasi historis yang terbentuk melalui praktik sosial, spiritual, dan pengetahuan lokal. Dengan demikian, resistensi perempuan terhadap pertambangan bukan hanya perlawanan terhadap kerusakan ekologis, tetapi

juga upaya mempertahankan keberlanjutan hidup dan martabat komunitas mereka di tengah arus perubahan global yang semakin menekan.

Dimensi Kekuasaan dan Praktik Perlawanan

Dari hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa resistensi perempuan terwujud dalam dua bentuk utama: (1) resistensi terbuka (*open resistance*) melalui demonstrasi, advokasi, dan kampanye lingkungan; serta (2) resistensi terselubung (*hidden or everyday resistance*) yang dijalankan melalui praktik sosial, simbolik, dan ritual.

Resistensi terbuka banyak digerakkan oleh kelompok perempuan muda dan aktivis lokal yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Mereka menggunakan media sosial dan forum publik untuk menyuarakan penolakan terhadap izin tambang serta memperjuangkan hak atas ruang hidup. Perempuan memainkan peran ganda; sebagai penjaga ekologi dan penggerak politik lokal; yang memperlihatkan transformasi dari posisi subordinat menuju aktor sosial yang kritis. Fenomena ini sejalan dengan temuan *Oxfam (2022)* yang mencatat peningkatan kepemimpinan perempuan dalam gerakan lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, resistensi tersembunyi tampak melalui tindakan-tindakan kecil seperti menolak menjual lahan, menghidupkan kembali ritual adat untuk melindungi tanah, atau memelihara narasi-narasi budaya tentang “ibu bumi” sebagai simbol penolakan terhadap logika ekstraktif. Praktik ini mencerminkan apa yang disebut *James Scott (2020)* sebagai *everyday forms of resistance* — strategi halus yang menantang kekuasaan tanpa konfrontasi langsung. Dalam kerangka Bourdieu, tindakan-tindakan tersebut merupakan ekspresi dari *habitus* perempuan pedesaan yang terbentuk oleh nilai-nilai ekologis dan solidaritas komunal, tetapi kini dimobilisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi kapitalistik.

Kedua bentuk resistensi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya dihadapi melalui protes formal, tetapi dinegosiasikan dalam keseharian. Dalam konteks ini, perempuan menjadi subjek yang menafsirkan ulang makna kekuasaan; bukan sekadar menolak dominasi, tetapi juga membangun bentuk baru dari *power within* dan *power with*, yakni kekuatan internal dan kolektif untuk mengorganisasi diri dan mengartikulasikan kepentingan mereka (Cornwall, 2021).

Dimensi Kekuasaan dan Praktik Perlawanan

Dari hasil wawancara mendalam, tampak bahwa resistensi perempuan terhadap ekspansi ekonomi ekstraktif dan ketimpangan sosial di wilayah pedesaan tidak berlangsung secara tunggal, melainkan menampilkan dua bentuk utama: *resistensi terbuka (open resistance)* dan *resistensi terselubung (hidden or everyday resistance)*. Kedua bentuk ini saling melengkapi dan menggambarkan dinamika relasi kuasa yang kompleks antara negara, korporasi, dan komunitas perempuan di tingkat lokal.

Bentuk resistensi terbuka ditunjukkan melalui aksi demonstrasi, advokasi publik, dan kampanye lingkungan yang diorganisasi oleh kelompok perempuan muda dan aktivis komunitas. Mereka bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, jaringan akademisi, serta media independen untuk menggalang solidaritas dan menentang kebijakan yang dianggap merugikan ruang hidup mereka. Penggunaan media sosial menjadi medium strategis bagi perempuan untuk menarasikan pengalaman, memperluas jangkauan isu, serta mengimbangi dominasi wacana yang biasanya dikendalikan oleh elite politik dan korporasi tambang. Dalam ruang digital, perempuan memproduksi *counter-narratives*; narasi tandingan yang memperlihatkan perspektif gender dalam persoalan ekologis dan keadilan sosial.

Lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam gerakan lingkungan menunjukkan pergeseran posisi sosial yang signifikan: dari sekadar penjaga domestik menuju aktor politik lokal yang aktif dan reflektif. Perempuan bukan hanya memperjuangkan kelestarian alam sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menegaskan hak mereka untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Fenomena ini selaras dengan temuan Oxfam (2022), yang mencatat bahwa kepemimpinan perempuan dalam gerakan lingkungan di Asia Tenggara mengalami peningkatan tajam, terutama dalam konteks advokasi keadilan ekologis dan hak atas tanah. Perempuan dengan demikian tampil sebagai simbol transformasi; dari subjek yang terpinggirkan menjadi agen sosial yang kritis dan visioner.

Sementara itu, bentuk resistensi terselubung tampak melalui tindakan-tindakan yang lebih subtil dan berbasis pada praktik sosial maupun budaya. Misalnya, perempuan menolak menjual lahan warisan keluarga, menghidupkan kembali ritual adat yang menegaskan kesakralan tanah dan air, serta mempertahankan narasi tentang “ibu bumi” sebagai metafora keberlanjutan dan penolakan terhadap logika ekstraktif kapitalisme. Bentuk resistensi ini sejalan dengan gagasan James Scott (2020) tentang *everyday forms of resistance*, yaitu strategi halus yang tidak selalu terlihat tetapi efektif dalam menantang dominasi tanpa konfrontasi langsung. Dalam konteks Bourdieu, tindakan tersebut merefleksikan *habitus* perempuan pedesaan yang berakar pada nilai-nilai ekologis, spiritualitas, dan solidaritas komunal, namun kini dimobilisasi sebagai strategi politik kultural untuk mempertahankan otonomi sosial dan ekonomi mereka.

Dengan demikian, baik resistensi terbuka maupun terselubung memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dihadapi melalui konflik frontal, melainkan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan berperan sebagai subjek aktif yang menafsirkan ulang makna kekuasaan. Mereka tidak hanya menolak dominasi, tetapi juga membangun bentuk baru dari *power within* dan *power with* (Cornwall, 2021): kekuatan internal untuk meneguhkan identitas dan nilai-nilai komunitas, serta kekuatan kolektif untuk mengorganisasi diri, memperluas jaringan solidaritas, dan

mengartikulasikan kepentingan bersama. Dengan cara ini, resistensi perempuan menjadi arena produksi makna baru tentang kekuasaan yang lebih partisipatif, etis, dan berkeadilan ekologis, sebagai sebuah bentuk politik dari bawah yang terus menantang tatanan dominan.

Negosiasi Gender dan Ruang Politik Lokal

Penelitian ini menemukan bahwa perlawanan perempuan terhadap dominasi ekonomi ekstraktif sering kali berhadapan dengan struktur patriarkal yang mengakar di tingkat komunitas. Dalam banyak kasus, suara perempuan dianggap tidak relevan dengan urusan “ekonomi besar” seperti pertambangan. Namun, perempuan mengubah keterbatasan tersebut menjadi peluang untuk membangun ruang politik alternatif.

Melalui kegiatan komunitas seperti *arisan lingkungan*, kelompok doa, dan forum budaya, perempuan menciptakan arena deliberatif tempat mereka dapat membahas dampak tambang dan merumuskan strategi kolektif. Arena ini menjadi *ruang politik mikro* (micro-political space) di mana relasi kuasa dinegosiasikan secara simbolik. Hal ini menegaskan analisis Foucault bahwa kekuasaan bukan hanya represif, melainkan juga produktif; ia melahirkan bentuk-bentuk baru dari subjek dan pengetahuan (Foucault, 1980).

Perempuan juga menggunakan identitas gender dan peran keibuan sebagai strategi politik. Mereka membingkai perlawanan sebagai “tanggung jawab moral untuk melindungi anak dan bumi,” yang berfungsi memperkuat legitimasi sosial sekaligus menghindari stigmatisasi sebagai aktor politik radikal. Strategi ini menunjukkan kemampuan perempuan dalam memanfaatkan *gendered moral capital* untuk mengartikulasikan kepentingan ekologis secara kultural. Temuan ini sejalan dengan riset *Arora-Jonsson (2022)* yang menunjukkan bahwa narasi keibuan sering digunakan perempuan di wilayah ekstraktif untuk membangun solidaritas lintas kelas dan generasi.

Penelitian ini menemukan bahwa perlawanan perempuan terhadap dominasi ekonomi ekstraktif tidak hanya berlangsung dalam ranah ekonomi, tetapi juga berhadapan langsung dengan struktur patriarkal yang telah mengakar kuat di tingkat komunitas. Dalam konteks sosial pedesaan, suara perempuan kerap dipandang tidak relevan untuk membicarakan urusan “ekonomi besar” seperti pertambangan, infrastruktur, atau investasi sumber daya alam. Pandangan ini berakar pada konstruksi sosial yang memisahkan ruang domestic; yang dianggap sebagai ranah perempuan; dari ruang publik dan ekonomi; yang diklaim sebagai ranah laki-laki. Namun, perempuan justru menjadikan keterbatasan ini sebagai titik awal untuk menciptakan strategi negosiasi dan resistensi yang khas. Mereka membangun ruang politik alternatif yang tidak selalu berbentuk formal, tetapi efektif dalam membangun kesadaran dan solidaritas komunitas.

Melalui kegiatan sehari-hari yang tampak sederhana seperti arisan lingkungan, kelompok doa, forum budaya, dan kegiatan sosial lainnya, perempuan menciptakan arena deliberatif yang

memungkinkan terjadinya dialog kritis mengenai dampak sosial dan ekologis dari aktivitas tambang. Dalam ruang ini, mereka mendiskusikan pengalaman, rasa kehilangan, dan ancaman terhadap kehidupan lokal, sekaligus merumuskan strategi kolektif untuk melindungi sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan komunitas. Arena tersebut berfungsi sebagai ruang politik mikro (*micro-political space*), tempat di mana relasi kuasa antara gender, ekonomi, dan negara dinegosiasikan secara simbolik maupun praktis.

Dalam kerangka teoritis Foucault (1980), ruang ini menggambarkan bagaimana kekuasaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga produktif; melahirkan subjek, pengetahuan, dan bentuk-bentuk baru dari resistensi. Kekuasaan bekerja melalui wacana, dan perempuan mengintervensi wacana tersebut dengan menghadirkan narasi-narasi tandingan yang menghubungkan keadilan ekologis dengan tanggung jawab moral dan nilai-nilai budaya lokal. Proses ini menunjukkan bahwa negosiasi gender bukan hanya upaya menantang otoritas laki-laki, tetapi juga cara perempuan membangun *agency* politik yang berakar pada kehidupan sehari-hari.

Salah satu strategi penting yang digunakan perempuan adalah pemanfaatan identitas gender dan peran keibuan sebagai basis legitimasi moral. Mereka membingkai perlawanan terhadap tambang bukan sebagai bentuk konfrontasi politik yang agresif, melainkan sebagai tanggung jawab etis untuk “melindungi anak-anak dan bumi.” Strategi ini memperkuat posisi sosial perempuan di mata masyarakat dan mencegah mereka distigmatisasi sebagai “aktor politik radikal.” Dalam konteks budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai penjaga moral komunitas, narasi keibuan menjadi sumber kekuatan simbolik yang efektif untuk membangun dukungan sosial dan solidaritas lintas kelas serta generasi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arora-Jonsson (2022), yang menunjukkan bahwa di berbagai wilayah ekstraktif di dunia, perempuan sering menggunakan narasi keibuan dan moralitas ekologis untuk mengartikulasikan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan. Narasi tersebut berfungsi ganda: sebagai bentuk ekspresi nilai-nilai kultural yang diakui oleh masyarakat dan sebagai instrumen politik untuk menantang struktur kekuasaan yang menyingkirkan suara perempuan.

Dengan demikian, negosiasi gender dalam ruang politik lokal bukan hanya proses penyesuaian terhadap tatanan patriarkal, melainkan juga praktik transformatif yang menegaskan kapasitas perempuan sebagai subjek politik yang otonom. Melalui strategi simbolik, kultural, dan moral, perempuan berhasil memperluas batas-batas partisipasi politik dan menciptakan bentuk baru dari kewargaan ekologis yang berakar pada pengalaman hidup dan nilai-nilai komunitas.

Implikasi terhadap Keadilan Gender dan Lingkungan

Hasil penelitian mengungkap bahwa resistensi perempuan tidak hanya berorientasi pada penolakan proyek tambang, tetapi juga pada redefinisi makna pembangunan dan keberlanjutan. Perempuan menolak paradigma pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keberlanjutan sosial-ekologis, serta memperjuangkan model ekonomi alternatif berbasis komunitas ; seperti pertanian organik, koperasi perempuan, dan ekonomi solidaritas. Inisiatif ini menunjukkan pergeseran dari politik resistensi menuju politik reproduksi sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, resistensi perempuan di wilayah pertambangan tidak dapat dilihat sekadar sebagai gerakan ekologis, tetapi sebagai praktik transformatif yang menantang struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan patriarki secara bersamaan. Mereka tidak hanya menuntut ruang partisipasi, tetapi juga membangun epistemologi baru tentang hubungan manusia dan alam, yang berakar pada pengalaman tubuh, kerja reproduktif, dan nilai-nilai kebersamaan.

Dalam konteks teoritis, hasil penelitian ini menegaskan relevansi *Feminist Political Ecology* sebagai kerangka yang mampu menjelaskan keterkaitan antara gender, kekuasaan, dan resistensi dalam ekonomi ekstraktif. Selain itu, penggunaan konsep *habitus* Bourdieu membantu memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dan relasi sosial menjadi sumber kekuatan simbolik dalam perlawanan perempuan. Sementara itu, pendekatan Foucaultian memperlihatkan bahwa resistensi tidak selalu terjadi “di luar” kekuasaan, melainkan justru dihasilkan dari relasi kekuasaan itu sendiri sebagai sebuah dinamika yang terus berproses dan bertransformasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi perempuan terhadap proyek tambang bukan semata-mata tindakan penolakan terhadap kerusakan lingkungan, tetapi merupakan ekspresi dari perjuangan yang lebih luas dalam mendefinisikan ulang makna pembangunan dan keberlanjutan. Perempuan di wilayah terdampak tambang mengkritisi paradigma pembangunan arus utama yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sering kali dengan mengorbankan keseimbangan sosial dan ekologis. Mereka menolak logika kapitalistik yang mengekstraksi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan komunitas dan kesejahteraan generasi mendatang.

Sebagai bentuk alternatif, perempuan membangun model ekonomi berbasis komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui prakarsa seperti pertanian organik, koperasi perempuan, dan ekonomi solidaritas, mereka menciptakan ruang ekonomi baru yang menekankan nilai kebersamaan, keberlanjutan, serta otonomi sosial. Inisiatif ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan perempuan dalam mengelola sumber daya secara adil, tetapi juga menggeser orientasi gerakan dari *politik resistensi* menuju *politik reproduksi sosia*; yakni perjuangan untuk mempertahankan kehidupan, keberlanjutan ekosistem, dan relasi sosial yang setara.

Dengan demikian, resistensi perempuan di wilayah pertambangan dapat dipahami sebagai praktik transformatif yang melampaui batas-batas aktivisme ekologis. Gerakan ini menantang struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan patriarki secara bersamaan. Perempuan tidak hanya menuntut ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membangun epistemologi baru tentang relasi manusia dengan alam. Epistemologi ini bersumber dari pengalaman tubuh dan kerja reproduktif perempuan; seperti mengasuh, merawat, dan menjaga sumber kehidupan; yang selama ini diabaikan dalam kerangka pembangunan modern. Dalam konteks ini, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab ekologis menjadi dasar moral baru dalam membayangkan masa depan pembangunan yang berkeadilan gender dan berwawasan lingkungan.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi *Feminist Political Ecology* (FPE) sebagai kerangka analisis yang mampu menjelaskan keterkaitan antara gender, kekuasaan, dan resistensi dalam konteks ekonomi ekstraktif. FPE memandang perempuan bukan sekadar korban dari eksploitasi sumber daya, melainkan aktor pengetahuan dan agen perubahan yang aktif membangun praktik keberlanjutan. Di sisi lain, penggunaan konsep *habitus* Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai tradisional, modal sosial, dan relasi simbolik dalam komunitas menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan perempuan menegosiasikan ruang perlawanan mereka. Habitus perempuan yang berakar pada etika merawat dan solidaritas sosial membentuk praktik resistensi yang khas dan berdaya.

Sementara itu, pendekatan Foucaultian menyoroti bahwa resistensi tidak selalu berlangsung di luar struktur kekuasaan, melainkan justru lahir dari dalam relasi kekuasaan itu sendiri. Perempuan menavigasi kekuasaan dengan memanfaatkan celah-celah dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi untuk mengartikulasikan bentuk-bentuk baru perlawanan yang produktif dan adaptif. Dinamika ini menunjukkan bahwa resistensi bukan proses statis, melainkan arena transformasi terus-menerus antara kuasa, pengetahuan, dan praktik sosial.

Dengan demikian, implikasi utama dari penelitian ini menegaskan bahwa keadilan gender dan keadilan ekologis merupakan dua dimensi yang tak terpisahkan. Perjuangan perempuan dalam konteks pertambangan bukan hanya upaya mempertahankan lingkungan hidup, tetapi juga gerakan politik yang menegaskan hak atas kehidupan yang setara, berkelanjutan, dan bermartabat.

PENUTUP

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai korban dari proyek pembangunan ekstraktif, tetapi sebagai agen sosial transformatif yang secara aktif membangun wacana alternatif tentang keberlanjutan, keadilan sosial, dan ekologi. Melalui praktik resistensi yang beragam; baik dalam bentuk aksi kolektif, negosiasi budaya, maupun

perlawanan sehari-hari, perempuan berperan menciptakan ruang politik baru yang menantang struktur kekuasaan ekonomi dan patriarki. Resistensi mereka berakar kuat pada pengalaman gender, solidaritas komunitas, serta kearifan lokal yang menegaskan hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Dengan demikian, perjuangan perempuan bukan hanya bentuk penolakan terhadap eksploitasi sumber daya, tetapi juga strategi rekonstruktif untuk membangun paradigma pembangunan yang lebih etis, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, praktik resistensi ini menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial menuju tata kelola sumber daya yang inklusif, setara, dan berkeadilan ekologis.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perempuan tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai korban dari proyek-proyek pembangunan yang bersifat ekstraktif, melainkan sebagai agen sosial transformatif yang aktif membentuk wacana baru mengenai keberlanjutan, keadilan sosial, dan ekologi. Melalui beragam bentuk resistensi; mulai dari aksi kolektif di tingkat komunitas, negosiasi terhadap nilai-nilai budaya yang menindas, hingga praktik perlawanan sehari-hari yang subtil—perempuan berhasil membuka ruang politik alternatif yang menantang dominasi ekonomi kapitalistik dan struktur patriarki yang mengakar. Gerakan mereka tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berakar pada pengalaman hidup yang berperspektif gender, solidaritas sosial yang kuat, serta kearifan lokal yang menempatkan keseimbangan antara manusia dan alam sebagai inti kehidupan. Oleh karena itu, resistensi perempuan tidak hanya dipahami sebagai tindakan penolakan terhadap eksploitasi sumber daya, tetapi juga sebagai strategi rekonstruktif untuk merumuskan paradigma pembangunan yang lebih etis, partisipatif, dan berkeadilan ekologis. Dalam jangka panjang, praktik resistensi ini menjadi basis penting bagi terwujudnya transformasi sosial menuju tata kelola sumber daya alam yang inklusif, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai kesetaraan antargender serta keberlanjutan ekologis bagi generasi mendatang. Pada kajian ini, belum ada bentuk perubahan nyata, berupa kebijakan local dengan adanya resistensi tersebut, dan ini bisa menjadi cela bagi peneliti selanjutnya untuk mengisi kekosongan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arora-Jonsson, S. (2022). *Gender, development and environmental justice*. Routledge.
- Ayu, G., Surtiari, K., Wannowitz, M., Prasetyoputra, P., Siagian, H., & Garschagen, M. (2024). Indonesia's social protection system: The relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 21(1). <https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2375995>
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Bryman, A. (2020). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Cornwall, A. (2021). *Power and participation revisited: Feminist reflections on development*. Zed Books.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). SAGE Publications.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Grunwald, A., & Saha, S. (2025). Access to cultural ecosystem services and how urban green spaces marginalize underprivileged groups. *npj Urban Sustainability*. <https://doi.org/10.1038/s42949-025-00221-z>
- Lesnikov, P., Kunz, N. C., & Harris, L. M. (2023). Gender and sustainability reporting: Critical analysis of gender approaches in mining. *Resources Policy*, 81(August 2022), 103273. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103273>
- Nightingale, A. J. (2021). *Feminist political ecology and the politics of environmental knowledge*. Routledge.
- Oxfam. (2022). *Extractive industries and gender justice: Policy brief*. Oxfam International.
- Policies, E. C., & Plans, N. (2016). Gaps and challenges to gender mainstreaming in national policies and plans. *Gender and Development Review*, 92–104.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2021). *Qualitative interviewing: The art of bearing data* (4th ed.). SAGE Publications.
- Scott, J. C. (2020). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Stringer, L. C., Mirzabaev, A., Benjaminsen, T. A., Harris, R. M. B., Jafari, M., Lissner, T. K., Stevens, N., & Pahlen, C. T. Der. (2021). Climate change impacts on water security in global drylands. *One Earth*, 4(6), 851–864. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.05.010>
- UN Women. (2023). *Women, mining, and the environment: Gendered impacts and policy pathways*. UN Women.
- Venes, F., Barca, S., & Navas, G. (2019). *Not victims, but fighters: A global overview on women's leadership in anti-mining struggles* (GA 695446). Global Alliance for Green and Gender Action.
- Vigil, S. (2024). Women's environmental struggles and extractivist politics: Toward an intersectional approach to resistance. *Geoforum*, 155(May 2023), 104076. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104076>
- Widiastuti, T., Al-Shami, S. A., Mawardi, I., Zulaikha, S., & Haron, R. (2024). Capturing the barriers and strategic solutions for women empowerment: Delphi analytical network process. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(3), 100345. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100345>